

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial melekat sebagai “*state obligation*” yang dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat, terutama bagi warga yang tidak mampu miskin dan mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Kehadiran Jaminan Kesejahteraan Sosial semakin relevan, karena setiap bangsa selalu berhadapan dengan kenyataan dimana selalu ada sejumlah warga masyarakat, baik perorangan, kelompok, keluarga, maupun kesatuan komunitas tertentu, yang mengalami hambatan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengalami risiko ketidakpastian dalam hidupnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan taraf kesejahteraan sosial. maka dari itu, secara hukum dan moral negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok warganya (Rahman, 2007: 225).

Operasi Pamong Praja yang digelar sejak dua minggu sebelum puasa. Sebagaian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berasal dari luar Jakarta akan dipulangkan kedaerah asalnya. Effendi Anas selaku Kepala Satpol PP DKI Jakarta, di Jakarta Pusat mengatakan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjaring terdiri atas pengemis, gelandangan, pengamen, PSK, dan pedagang asongan dan hanya 10 persen PMKS yang ber-KTP DKI, sementara 40 persen dari Jawa Tengah dan 50 persen dari Jawa Barat yang semua itu tergolong orang miskin (kompas, 2010).

Menurut Badan Statistik Maret 2010, mencatat sekitar 238 juta warga Indonesia, sebanyak 31,02 juta orang (13,33 persen) termasuk kategori miskin. dan 8,59 juta orang (7,41%) berstatus pengangguran terbuka (Joglo Smart, 2010). Fakta sosial mengenai jumlah orang miskin maupun mengenai pengusiran, dilarangnya pengemis, pengamen, untuk meminta-minta di jalan, bahkan pemulangan kembali bagi orang miskin ketempat asalnya, ini merupakan indikator tidak adanya jaminan sosial bagi orang miskin.

Masalah Kemiskinan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi 1998, bukan saja laju pertumbuhan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja di tanah air, melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu menganggur penuh atau sama sekali tidak

bekerja (*open unemploment*) maupun setengah menganggur atau bekerja dibawah jam kerja normal (*under employment*). Dalam kondisi pasar kerja seperti ini maka tenaga kerja tersebut banyak yang memasuki lapangan kerja di sektor informal, termasuk di sektor pertanian, yang pendapatannya relatif rendah, sehingga menambah pula penduduk yang masuk kategori miskin tersebut (Hamid, Hendrio, 2000: 19).

Menurut Al-Syathibi: kewajiban sosial itu terkait dengan kepentingan umum, artinya individu tidak mampu melaksanakan tugas-tugas ini, negaralah yang bertanggung jawab melaksanakannya (Azmi, 2005: 188). Dewasa ini, bila di lihat kurangnya rakyat mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan, yang berdampak terhadap kebodohan, keterbelakangan dan lain-lain. dari itu, diperlukan suatu jaminan sosial yang benar-benar dapat mensejahterakan seluruh rakyat yang membutuhkannya.

Islam mengatur bagaimana untuk memberdayakan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam zakat, infaq, dan shadaqah. Semua itu adalah hal bentuk-bentuk pemberdayaan. Jaminan sosial diperintahkan dalam Islam, sebagai bentuk keadilan diseluruh persoalan yang berhubungan dengan masyarakat. Menurut, Al-Qur'an tujuan utama Allah memberikan gambaran hidup mengenai pelaksanaan ajarannya adalah untuk kemaslahatan umatnya (Ahmad, 1998: 1).

Para ahli fiqh juga telah membahas pertanyaan penting mengenai kebutuhan dasar yang harus di identifikasi dan dipenuhi bagi seluruh

warga negara. al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan dalam Islam, telah berulang kali menegaskan pemberian makanan bagi mereka yang kelaparan. Hak pemenuhan dasar selain makanan, pakaian, tempat tinggal untuk melangsungkan hidup (Ahmad, 1998: 6).

Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus di tanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak-hak bagi fakir miskin dalam harta orang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan jaminan sosial, sehingga melalui sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ekonomi Islam (Al-Haritsi, 2008: 284).

Jaminan sosial adalah suatu bentuk tanggung- jawab yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha untuk merealisasikan kebutuhan mereka, serta menghindarkan keburukan dari mereka. Barangkali ungakapan yang komprehensif bagi makna dari jaminan sosial adalah sabda Nabi yang berbunyi :

المسلم للمؤمن كلبنیان یصدوا بعضا بعضی (رواه الترمیزی)

*“Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”*  
(HR, Tarmidzi).

Konsep jaminan sosial yang diterapkan dalam pemerintahan Umar bin Khatab r.a. tidak hanya membagikan harta dalam bentuk uang, tapi

juga membagikannya dalam bentuk benda, seperti diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan untuk mengambil satu ember makanan lalu diaduk dan dibuat roti, kemudian didinginkan dengan minyak (Sudarsono, 2007: 134).

Jaminan sosial yang dipraktekkan Umar bin Khattab r.a, pada masa itu sangat revolusioner. Sebab, kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyaknya keburukan. Kemiskinan membahayakan terhadap akidah seorang muslim dan akhlaknya dan terhadap ketentraman masyarakat. Bersama kemiskinan, maka lahir banyak problem etika dalam kehidupan, seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani di daerah manapun yang didalamnya tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah yang miskin, dan menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, kejumudan sosial, keterbelakangan peradaban dan lain-lain (Al-Haritsi, 2008: 283).

Mekanisme kontribusi dan praktek-praktek sosial yang telah dilakukan Umar bin Khatab r.a., dalam mensejahterakan rakyatnya tidak hanya sekedar penanggulangan kemiskinan jangka pendek, lebih bersifat visioner (jangka panjang). Hal ini dapat dipahami dari sikap keteladanan Umar bin Khatab r.a. tentang pembagian tanah di berbagai daerah yang ditaklukkan; dimana beliau menolak membaginya karena memperhatikan hak generasi mendatang di dalamnya, beliau mengatakan demi zat yang

diriku di tanganya, seandainya aku tidak khawatir meninggalkan orang miskin terakhir dan tidak memiliki sesuatu, niscaya tidak ditaklukan suatu daerah pun pada masaku melainkan aku akan membaginya seperti Rasullulah Saw membagi *ghanimah* pada perang Khaibar. Akan tetapi akau akan meninggalkannya (daerah taklukan) sebagai simpanan untuk mereka yang akan mereka bagi nanti. Adapun yang termasuk dalam wilayah jaminan sosial disini adalah semua orang yang membutuhkan dari kalangan masyarakat yang terdapat dalam suatu negara (Al-Haritsi, 2008: 292).

Hal inilah membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Praktek jaminan sosial pada masa Umar bin Khattab. Karena belum ada yang mengkaji dalam pendekatan sosiologis dan historis, maka, dalam dalam skirpsi ini, penulis ingin menggali kembali jaminan sosial masa lalu, untuk menambah referensi saat ini.

## **B. Penegasan Istilah**

Guna mempermudah dalam pembahasan selanjutnya dan agar terhindar dari kekaburan dan perluasan pembahasan serta pemahaman, maka perlu disampaikan beberapa istilah berkaitan dengan judul tersebut:

- a. Jaminan Sosial : Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan

menghindarkan keburukan dari mereka (Al-Haritsi, 2008: 285).

- b. Islam : Salah satu agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang terhadap umatnya, Taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. serta Petunjuk untuk memperoleh keselamatan hidup baik di dunia, maupun di akhirat (Hamid, 2005: 2).
- c. Umar bin Khattab : Khalifah setelah Abu Bakar mempunyai kebijakan ekonomi yang dapat direalisasikan pada masa pemerintahannya. Umar adalah putra Khattab bin Abdullah bin Qurth, Ibunya Hantamah binti Hasyim (Al-Haritsi, 2008: 17-18).

### **C. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana praktek jaminan sosial pada masa Umar bin Khattab?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui mengenai jaminan sosial yang sudah di praktekkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Akademik:**

- a. Dapat mengetahui dan menguraikan praktek Jaminan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Sekaligus sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang jaminan sosial Umar bin Khattab sehingga mempunyai solidaritas yang tinggi sesama makhluk Tuhan.

## **2. Secara Praktis.**

- a. Untuk kalangan ekonomi, agar mempraktekkan nilai-nilai tentang jaminan sosial.
- b. Untuk pemerintah, agar memberikan jaminan sosial terhadap orang – orang yang membutuhkan dan memperhatikan masalah kesejahteraan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Menurut penulis, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian tentang jaminan sosial dalam Islam (Studi tentang Jaminan sosial pada masa Umar bin Khattab) akan tetapi, ada beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang kemiskinan yang hubungannya sangat berkaitan dengan jaminan sosial dari pendekatan yang berbeda, seperti:

1. Penelitian M. Hamdar Arraiyyah (2007) dengan mengambil judul *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif al-Qur'an*. Menyimpulkan kemiskinan yang melanda seseorang tidak berarti ia dibenci Tuhan. Sebaliknya, kekayaan yang dianugerahkan kepada seseorang tidak pula berarti ia dikasihani oleh Tuhan. Kekayaan ataupun



kemiskinan merupakan ujian-Nya bagi yang sabar menghadapi kesulitan dikasihani oleh Tuhan. Demikian pula halnya bagi manusia yang bersyukur tatkala diberi nikmat, ia akan dikasihani oleh Tuhan. Orang kaya maupun orang miskin sama-sama berpeluang untuk mendapatkan ridha Allah melalui iman dan amal saleh.

2. Penelitian A. Qodri Azizy (2004) yang mengambil judul *Membangun Fondasi Pemberdayaan Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Menyimpulkan bahwa untuk memperbaiki ekonomi umat Islam memasuki abad 21 ini ada beberapa agenda yang harus dikerjakan. Kesiapan mentalitas umat untuk berubah dan siap maju demi memperbaiki nasib diri menjadi prioritas utama dalam membangun kemajuan ekonomi. Demikian pelurusan pemahaman dan pemaknaan ajaran Islam juga merupakan program yang tidak dapat ditinggalkan. Pemahaman bahwa keduniaan, terlebih lagi harta kekayaan, jauh dari ibadah dan keakhiratan sama sekali salah dan menjadi racun terhadap umat Islam. Dunia dan akherat tidak dapat dipisahkan: *aldunya mazra'at al-akherah* (keduniaan adalah investasi yang nantinya berbuah di akherat).
3. Joni Yusuf (2008) dengan judul *Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan dalam perspektif hukum Islam*. menjelaskan bahwa kemiskinan akan terus berkembang jika tidak diberantas. Jadi, kemiskinan bukan semata-mata terjadi dengan sendiri, tapi karena tidak adanya pemberdayaan dari segi hukum Islam.

4. Khusna Nazalia MH (2009) dengan mengambil judul: *Asuransi jaminan sosial tenaga kerja menurut Islam (study kasus di univrsitas Muhammadiyah Surakarta)*. Menjelaskan bahwa pelaksanaan transaksi administrasi jamsostek di UMS berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan yang berarti karena telah terciptanya kepercayaan antara pihak UMS dengan jamsostek.
5. Muhammad Najib Sagala (2010) *Konsep Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Ekonomi (Pendekatan Tafsir Al-Misbah)*. Kesimpulan bahwa pengertian kemiskinan yang ditunjuk oleh berbagai kosakata ataupun term itu pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kemiskinan materi dan kemiskinan rohani atau jiwa. Ia mengatakan dalam skripsinya, bahwa kemiskinan hanya bisa dientaskan melalui pemberdayaan dan jaminan yang membangun daya kreatifitas objek pemberdayaan agar mandiri. Melihat persoalan diatas, penulis tertarik meneliti “jaminan sosial dalam Islam (studi tentang jaminan sosial pada masa Umar bin Khattab)”. oleh karena, belum adanya yang membahas dari pendekatan perspektif sosiologis dan historis, maka penulis akan menelitinya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah studi literatur (*library research*) yaitu mencari dan menggunakan bahan-bahan tertulis tentang jaminan sosial dan buku-buku yang mengkaji tentang Umar bin

Khatab (Nazir, 1989: 55). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah *sosiologis dan historis* (Arikunto, Suharsini, 1992:25).

Adapun Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah mengembangkan ,menjelaskan, dan menginterpretasikan kehidupan sosial pada masa Umar bin Khatab, kemudian dikaitkan dengan fenomena sosial mengenai jaminan sosial (Johnson, 1988:34).

Sedangkan Pendekatan historis digunakan untuk memperoleh data biografi pemikiran Umar bin Khatab (Suharsimi,1991:25). Yang dimaksud dengan historis di sini adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala serta memahami kenyataan sejarah yang dikaitkan dengan situasi sekarang mengenai jaminan sosial (Zubair dan Bakker, 1990:67 ).

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan dokumentasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari buku-buku, jurnal, majalah dan tulisan-tulisan pada situs internet. Bahan–bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan judul penelitian jaminan sosial dalam Islam studi tentang jaminan sosial dalam masa pemerintahan Umar bin Khatab (Nasucha, 2009:69-70).

Sumber penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: sumber primer dan sumber skunder. Data Primer dari buku yang di tulis oleh:

- a. Jaribah bin Ahmad Al-haritsi dengan judul ” *fikih ekonomi Umar bin Al- Khatab* ” (2008).”
- b. Amiur Nuruddin dengan judul ” *Ijtihad Umar ibn Al-Khatab*,
- c. Syibli Nu’mani dengan judul: ”*Umar yang Agung,sejarah dan analisa kepemimpinan khalifah IP*”(1981).”
- d. Muhammad Husain Haekal dengan judul: ”*Umar bin Khattab,sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu*”(2001).”

Sedangkan skunder di ambil dari beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, antara lain:

- a. Ziauddin Ahmad dengan judul: ” *Al-Qur’an Kemiskinan dan pemerataan pendapatan*” (1998).”
- b. Edy Suandi Hamid dengan judul:” *Ekonomi Indonesia memasuki millennium, Menimbang ekonomi Islam, keuangan publik dalam pemikiran Islam* “( 2000).”
- c. Ahmad Subianto dengan judul: “*Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa*”(2010).”

### **3. Metode Analisis Data**

1. Deduktif yaitu: Mengumpulkan dan menelaah serta meneliti data yang bersifat umum. Seperti fakta sosial mengenai jaminan sosial yang terjadi

pada masa Umar bin Khattab. Kemudian, dihubungkan dengan jaminan sosial dalam Islam. untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus (Bakker, 1994: 65).

2. Induktif, yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum (Bakker, Anton. 1992: 664).

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Bab <i>pertama</i> , | Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.  |
| Bab <i>kedua</i> ,   | Tinjauan Umum tentang Jaminan Sosial, Pengertian Jaminan Sosial menurut Umar bin Khattab, Sumber-Sumber Jaminan Sosial Umar bin Khattab, bentuk-bentuk Jaminan sosial Umar bin Khattab, Penanggung Jawab dalam Jaminan Sosial Umar bin Khattab, orang-orang yang menerima Jaminan Sosial menurut Umar bin Khattab. |
| Bab <i>ketiga</i> ,  | Biografi dan Kepemimpinan Umar bin Khattab.  |
| Bab <i>keempat</i> , | Analisis Penulis tentang Jaminan sosial Pada masa Umar bin Khattab.  |
| Bab <i>kelima</i> ,  | Kesimpulan dan saran untuk pemerintahan akan pentingnya jaminan sosial bagi bangsa dan negara.   |